Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam
Volume 7 Nomor 1, 2025
e-ISSN: 2655-8831

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP BUDAYA PERNIKAHAN *NGALOR-NGULON* (KE ARAH UTARA DAN BARAT) (KE ARAH UTARA DAN BARAT) (STUDI KASUS DUSUN SWEDEN DESA KELIGRENJENG KECAMATAN WONOTIRTO KABUPATEN BLITAR)

[1]Niken Ayuni Lestari, [2]Syamsu Madyan, [3]Faridatus Sa'adah
Universitas Islam Malang
e-mail: [1]22101012034@unisma.ac.id , [2]syamsu.madyan@unisma.ac.id ,
[2]faridatus.saadah@unisma.ac.id.

Abstrak

In One of the prohibited marriage customs in Javanese culture is the ngalor-ngulon marriage (towards the north and west), which is believed to bring misfortune and disaster to those who practice it, such as illness, financial difficulties, and even death. In the context of Javanese culture, for example, there is a belief that marrying someone from these directions could create an imbalance in the relationship, both physically and spiritually. The north and west are often symbolically linked to certain energies that are considered inappropriate for marriage. Furthermore, this prohibition may reflect efforts to maintain harmony in social and familial relationships, with the hope that a marriage between individuals from these directions might cause imbalance or even calamity. Although many view this as a myth or a belief passed down through generations, this prohibition remains an important part of cultural values that must be respected by the community, especially the Javanese people. This study employs an empirical research method with a sociological-legal approach. Both secondary and primary data were used, and the study is categorized as a case study. Data was collected through interviews and observations with religious leaders, customary figures, government officials, and the local community. The Miles and Huberman interactive model was used for data analysis. In-depth interviews, data triangulation, extended observation, discussions with experts, and peer discussions were employed to verify the validity of the research data. The study found that in the Sweden Hamlet of Kaligrenjeng Village, Wonotirto District, Blitar Regency, the practice of ngalor-ngulon (north and west) marriage is prohibited. There are myths surrounding such marriages, and the study also examines the Islamic legal perspective on the ngalor-ngulon marriage custom in this area.

Keywords: *Islamic Law, Culture, Marriage*

A. Pendahuluan

Perkawinan adalah lembaga formal yang mengatur hak pasangan untuk hidup bersama sebagai suami istri, dengan tujuan menciptakan keluarga, mendidik anak, menghindari maksiat, dan menjaga ketentraman batin. Makna perkawinan juga mencakup kepentingan dan pandangan hidup bangsa, negara, dan masyarakat (Anam, 2019). Dalam pandangan Islam, perkawinan bukan hanya untuk tujuan

This work is licensed under Creative Commons Attribution Non Commercial 4.0 International License Available online on: http://riset.unisma.ac.id/index.php/fai/index

seksual, tetapi juga untuk memperoleh keturunan yang sah dan membangun kehidupan damai dalam rumah tangga *sakinah mawadah wa rahmah*. Perkawinan dianggap sah jika dilaksanakan sesuai hukum dan tercatat oleh instansi berwenang (Setiawan, 2024). Keinginan membangun rumah tangga adalah bagian penting dari peradaban manusia, yang menciptakan sifat dan kedamaian batin, serta berujung pada cinta sejati(Lestari, Dkk, 2022). Pondasi suatu bangsa terletak pada kekuatan keluarganya, dan pondasi sebuah keluarga terletak pada pernikahan. Pernikahan adalah dasar yang menciptakan keluarga dan memungkinkan keluarga tersebut berkembang. Melalui pernikahan, sebuah keluarga dibina dan dididik, baik dari sisi spiritual maupun material, untuk tumbuh dan mencapai kesejahteraan(Haerul Azmi, Dkk, 2022). Islam menyarankan untuk menikah sebab menikah merupakan sunnah rosul , Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Ar-Rad Ayat 38 yakni menjadi berikut:

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ اَزْوَاجًا وَّذُرِّيَّةً ۗوَمَا كَانَ لِرَسُوْلٍ اَنْ يَّأْتِيَ بِاٰيَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ۗلِكُلِّ اَجَلٍ كِتَاب

Artinya: "Sesungguhnya kami sudah mengutus beberapa rasul sebelum kamu Muhammad, dan kami berikan kepada mereka istri dan anak. Tidak mungkin bagi seorang rasul datang dengan membawa bukti (mukjizat), melainkan hanya dengan izin Allah. Untuk semua waktu ada kitab (tertentu)".

Indonesia kaya akan keragaman suku dan budaya, yang merupakan identitas bangsa. Keanekaragaman ini harus dilestarikan karena dapat mendorong kemajuan negara. Setiap suku di Indonesia memiliki adat dan tradisi yang berbeda, termasuk dalam hal pernikahan. Hukum adat mengatur pantangan-pantangan dalam pernikahan yang dianggap tabu dan dapat berdampak buruk jika dilanggar. Contohnya, dalam budaya Jawa, terdapat aturan ketat mengenai pernikahan, seperti larangan pernikahan antara *weton geyeng* (wage dan pahing), *jilu* (anak pertama dengan anak ketiga), *sunduk wuwung* (pasangan yang tinggal berdekatan), dan *ngalon-ngulon* (arah utara dan barat)(Irfan, 2019). Dalam tradisi pernikahan Jawa, selain pantangan yang harus diikuti, terdapat keyakinan mengenai syarat matematis dalam menentukan jodoh. Salah satunya adalah larangan menikah di arah *ngalor-ngulon* (ke arah utara dan barat) yang dianggap membawa kesialan. Masyarakat Jawa percaya bahwa pernikahan di area tersebut dapat menimbulkan malapetaka, seperti penyakit, kematian, nasib buruk, serta perselisihan dalam rumah tangga (Krismawati, Dkk, 2022). Masyarakat sering mengikuti tradisi *ngalor-ngulon (ke arah utara dan barat)* dalam memilih calon pengantin, berdasarkan kepercayaan leluhur yang dilestarikan turun temurun.

Untuk menciptakan keseimbangan dalam sistem sosial, perlu adanya mekanisme penyelesaian konflik agar kehidupan masyarakat tetap terintegrasi dan fungsional(Lestari, Dkk, 2022). Konsep larangan arah *ngalor-ngulon* (ke arah utara dan barat) dalam tradisi Jawa, yang dipercaya dapat membawa musibah, sudah ada sebelum Islam masuk. Masyarakat Dusun Sweden, meski beragama Islam, tetap memegang teguh tradisi ini. Larangan tersebut berhubungan dengan adat yang menganggap arah tertentu membawa bencana, meski bertentangan dengan ajaran Islam yang tidak melarang arah tersebut. Tradisi ini menarik untuk dikaji terkait keterkaitannya dengan hukum Islam dan budaya local. Penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai permasalahan budaya pernikahan *ngalor-ngulon (ke arah utara dan barat)* melalui perspektif Hukum Islam, yang akan dibahas dalam skripsi berjudul "Perspektif Hukum Islam terhadap Budaya Pernikahan *Ngalor-Ngulon* (Studi Kasus Dusun Sweden Desa Kaligrenjeng Kecamatan Wonotirto Kabupaten Blitar)".

Dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yakni, rumusan masalah yang pertama bertujuan untuk menggali alasan masyarakat Dusun Sweden, Desa Kaligrenjeng, Kecamatan Wonotirto, Kabupaten Blitar, yang melarang pernikahan dengan arah *ngalor-ngulon* (ke arah utara dan barat). Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi mitos-mitos yang berkembang di kalangan masyarakat terkait dengan pernikahan yang dilakukan dengan arah tersebut. Aspek kultural dan kepercayaan lokal yang melatarbelakangi pelarangan ini perlu dikaji secara mendalam untuk memahami bagaimana tradisi dan nilai-nilai yang ada memengaruhi pandangan masyarakat terhadap pernikahan. Sedangkan rumusan masalah kedua berkaitan dengan perspektif hukum Islam terhadap budaya pernikahan yang dilakukan dengan arah *ngalor-ngulon* (ke arah utara dan barat) di daerah tersebut. Dalam konteks ini, perlu dilakukan analisis mengenai kesesuaian antara budaya lokal dan ajaran Islam terkait dengan pernikahan, serta apakah ada nilai-nilai yang bertentangan atau justru mendukung budaya tersebut dalam pandangan hukum Islam. Hal ini penting untuk memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai hubungan antara budaya dan agama dalam masyarakat Dusun Sweden.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali informasi yang lebih mendalam dan membandingkan hasil penelitian sebelumnya, baik kelebihan maupun kekurangannya, untuk mencapai tujuan yang lebih maksimal. Salah satu penelitian terdahulu dilakukan oleh Badrut Tamam dan Risna Wati (2022) tentang "Tradisi Larangan Nikah *Ngalor-Ngulon* di Daerah Purwoharjo Banyuwangi Perspektif Teori Sistem Jasser Auda". Penelitian ini menyimpulkan bahwa adat larangan

perkawinan *ngalor-ngulon* (ke arah utara dan barat) di Purwoharjo bertahan karena faktor-faktor seperti kurangnya pemahaman agama, mitos yang diyakini masyarakat, masalah kepercayaan, serta struktur sosial desa. Oleh karena itu, adat ini tidak bisa dihapuskan begitu saja. Penelitian ini oleh Muhammad Sholikhudin (2022) berfokus pada "Tinjauan Maqashid Shari'ah terhadap Pola Penyesuaian Perkawinan *Ngalor-Ngulon* di Nganjuk". Penelitian ini mengungkapkan bahwa meskipun ada larangan perkawinan *ngalor-ngulon* (ke arah utara dan barat), masyarakat Desa Katerban tetap melaksanakan pernikahan tersebut dengan pendekatan pola penyesuaian, seperti mengganti KTP, mengadakan resepsi di rumah calon pengantin, dan tasyakuran. Berdasarkan *maqashid syariah*, pola penyesuaian ini dianggap sah dan mendukung pelestarian adat, dengan menekankan prinsip dasar agama dan keturunan pada tingkat kebutuhan yang penting *(dharuriyyat).* Penelitian ini memberikan pemahaman lebih mendalam tentang prinsip *maqashid syariah* dalam konteks adat tersebut. Penelitian ini memiliki urgensi yang besar, karena dapat memberikan solusi terhadap berbagai masalah di dunia, berdasarkan pada penelitian-penelitian terdahulu. Perbedaan utama antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya terletak pada objek kajiannya. Penelitian pertama membahas "Tradisi Larangan Nikah *Ngalor-Ngulon* di Daerah Purwoharjo Banyuwangi dengan perspektif Teori Sistem Jasser Auda", sementara penelitian kedua mengkaji "Tinjauan *Maqashid Shari'ah* terhadap Pola Penyesuaian Perkawinan *Ngalor-Ngulon* di Nganjuk". Penelitian penulis memiliki fokus yang berbeda, yakni "Perspektif Hukum Islam terhadap Budaya Pernikahan *Ngalor-Ngulon* (Studi Kasus Dusun Sweden Desa Kaligrenjeng Kecamatan Wonotirto Kabupaten Blitar)." Peneliti ingin mengkaji lebih dalam mengenai larangan pernikahan *ngalor-ngulon* (ke arah utara dan barat) di Blitar, khususnya di Dusun Sweden, Desa Kaligrenjeng, dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini bertujuan agar hasilnya dapat menjadi referensi dalam mengembangkan nilai-nilai keagamaan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, serta sebagai acuan dalam mengembangkan nilai-nilai keagamaan di tengah tradisi nenek moyang.

Pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami istri, membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan iman kepada Allah SWT. Di Indonesia, peraturan terkait pernikahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang diperbarui melalui UU No. 16 Tahun 2019. Undang-undang ini mencakup pengertian perkawinan, syarat-syaratnya, larangan perkawinan, serta kewajiban suami istri dalam rumah tangga. Selain itu, Mahkamah Agung RI juga mengatur perkawinan berdasarkan pedoman dalam Kompilasi Hukum Islam(Rahman, Dkk,

2022). Perspektif hukum islam adalah aturan turan hukum dalam konteks Islam berakar pada sumber-sumber utama ajaran agama, yaitu Al-Qur'an dan Hadis, yang memberikan pedoman mengenai tata kelola kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Hukum Islam, atau yang dikenal dengan syariah, tidak hanya mengatur ibadah, tetapi juga bagaimana seorang Muslim berinteraksi dengan sesama dalam kehidupan sehari-hari.(Hisham, 2022)

Pernikahan adalah sebuah peristiwa sakral yang dilakukan oleh dua mempelai atau suami-istri, yang bertujuan untuk melaksanakan perintah Allah SWT. Dalam perspektif agama, pernikahan dianggap sebagai ibadah. Para ahli hukum juga memberikan berbagai tafsir mengenai istilah *al-zawaj* (pasangan) yang merujuk pada pernikahan. Menurut ulama Imam Syafi'i, pernikahan merupakan akad yang sah yang memungkinkan terjadinya hubungan seksual antara suami dan istri, yang dapat diungkapkan dengan kalimat seperti *ankahtuka* (aku nikahi kamu) atau *tazawwajtu* (aku menikah denganmu)(Setyawati, Dkk 2022). Selain itu ada juga rukun dan syarat pernikahan yaitu adanya calon mempelai, adanya wali, adanya saksi,adanya ijab kabul, dan mahar atau mas kawin. Tujuan pernikahan dalam Islam mencakup dimensi spiritual, sosial, dan kekeluargaan yang sangat penting untuk membangun kehidupan yang harmonis.

Pernikahan dianggap sebagai ikatan suci yang tidak hanya membantu individu menghindari perilaku dosa seperti zina, tetapi juga sebagai ibadah yang memberikan pahala jika dilaksanakan sesuai dengan prinsip Islam. Salah satu tujuan utama pernikahan adalah menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah,* dan *rahmah,* yang berfungsi sebagai pondasi bagi kesejahteraan masyarakat dan perkembangan generasi masa depan. Selain itu, pernikahan juga bertujuan untuk menjaga kelangsungan hidup, mempererat tali silaturahmi, dan memperkuat hubungan spiritual dengan Sang Pencipta. Dasar hukum pernikahan Pernikahan merupakan rangkaian ibadah sunnah Allah SWT dan Rasulullah. Artinya pernikahan mempunyai dasar hukum dalam pandangan Islam, banyak sekali referensi terkait pernikahan seperti Al-Qur'an, hadits*, ijma` Fiqh* ulama dan *ijtihad* para ulama. Larangan pernikahan ada dua kategori yaitu yang pertama Larangan pernikahan yang berlaku haram selamanya *(mahram muabbad)* dan yang kedua Larangan perkawinan *mahram ghairu muabbad* sebab adanya hubungan perkawinan yang disebut dengan hubungan mushahar. Kemudian di dalam Islam adanya tiga jenis pernikahan yang haram dilaksanakan terkait lain nikah *mut`ah*, nikah *tahlil* dan nikah *sighar*.

Hukum Islam dan hukum adat di Indonesia sering kali berjalan seiring, meskipun memiliki sumber dan metodologi yang berbeda. Hukum Islam mengatur kehidupan umat Muslim berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis, dengan tujuan utama

menciptakan kedamaian, keadilan, dan keharmonisan. Sementara itu, hukum adat yang berkembang dalam masyarakat lokal, seperti hukum adat *ngalor-ngulon* (ke arah utara dan barat), lebih berfokus pada tradisi dan kearifan lokal. Meski keduanya bertujuan untuk menjaga keharmonisan, perbedaan sering muncul, terutama dalam praktik adat yang tidak sepenuhnya selaras dengan prinsip Islam. Dalam hal ini, negosiasi antara keduanya diperlukan untuk menjaga keseimbangan, seperti dalam pernikahan adat yang mengatur arah rumah, yang bisa diadaptasi selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat Islam.

B. Metode

Penelitian ini adalah jenis penelitian Empiris dengan pendekatan sosiologi hukum , yang menghasilkan data berupa deskripsi mendalam berdasarkan pengamatan langsung dan catatan tertulis terkait kejadian dan perilaku manusia di masyarakat. Peneliti memilih pendekatan ini karena dapat menjawab permasalahan yang relevan dengan topik penelitian serta mendalami pola tingkah laku manusia melalui wawancara dan diskusi langsung dengan informan di Dusun Sweden, Desa Kaligrenjeng, Kecamatan Wonotirto, Kabupaten Blitar. Jenis penelitian yang digunakan adalah *yuridis-empiris*, yang memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi valid melalui interaksi langsung dengan informan dan pengamatan fenomena di lapangan.

Sumber data penelitian ini dibagi menjadi tiga kategori: data *primer* yang diperoleh langsung dari lapangan melalui observasi, wawancara, dan diskusi, data *sekunder* yang dikumpulkan dari literatur dan publikasi yang relevan, serta sumber data *tersier* yang memberikan penjelasan tambahan, seperti kamus dan ensiklopedia. Teknik pengumpulan data meliputi observasi langsung, dan wawancara semi-terstruktur. Analisis data dilakukan dengan pendekatan model mengalir, yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dijaga melalui teknik triangulasi, yakni membandingkan data dari berbagai sumber dan alat untuk memastikan validitas informasi yang diperoleh.

C. Hasil dan Pembahasan

Kecamatan Wonotirto, yang terletak di Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur, memiliki potensi geografis yang mendukung ketersediaan air bersih dan berbagai sektor ekonomi. Kecamatan ini memiliki luas 40,39 km^2 dan terdiri dari 8 desa, dengan Desa Kaligrenjeng sebagai salah satu desa yang menjadi fokus penelitian. Desa ini memiliki potensi besar dalam sektor pertanian, dengan tanaman padi, jagung, tebu, dan palawija menjadi komoditas utama. Selain itu, sektor peternakan,

perikanan, serta industri kecil dan menengah seperti kerajinan tangan dan pengolahan hasil pertanian turut berkembang. Potensi pariwisata juga cukup menjanjikan, terutama dengan adanya pantai Tambakrejo dan Pasir Putih Gondomayit. Penduduk di Dusun Sweden, Desa Kaligrenjeng, mayoritas bekerja di sektor pertanian, terutama dalam budidaya tebu dan sawah. Secara sosial, hukum adat ngalor-ngulon yang diterapkan dalam masyarakat seringkali menjadi penilaian status sosial, terutama dalam hal pernikahan. Meski demikian, hukum adat ini tidak hanya berkaitan dengan kemiskinan, tetapi lebih kepada sistem nilai yang bertujuan menjaga keharmonisan sosial, dan seiring berjalannya waktu, perlunya penyesuaian untuk menjaga solidaritas dan ketertiban sosial.

Kondisi sosial keagamaan di Dusun Sweden menunjukkan adanya semangat keagamaan yang tinggi meskipun fasilitas terbatas. Masyarakat setempat tetap melaksanakan tradisi keagamaan seperti yasinan, tahlilan, dan pengajian anak-anak di bulan Ramadhan. Meskipun tokoh agama yang kompeten masih terbatas, kegiatan-kegiatan ini menunjukkan kuatnya ikatan sosial dan keinginan untuk menjaga nilai-nilai agama di kalangan masyarakat. Di sisi lain, pendidikan juga mengalami perkembangan pesat dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka. Dulu, banyak orang tua hanya memiliki pendidikan dasar, namun kini mereka berusaha agar anak-anak mereka bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, baik dalam bidang pendidikan umum maupun agama. Fasilitas pendidikan di desa semakin berkembang, dengan adanya Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, hingga Perguruan Tinggi. Hal ini memungkinkan generasi muda Dusun Sweden untuk bersaing dalam dunia yang semakin modern.

Adat pernikahan ngalor-ngulon, yang diterapkan di Dusun Sweden, memiliki syarat unik yang masih dijaga oleh sebagian masyarakat setempat. Salah satunya adalah pengantin yang "dibuang," yaitu dipindahkan sementara ke rumah saudara untuk memenuhi syarat adat. Selain itu, dalam acara pernikahan, hanya satu pihak yang diperkenankan menyelenggarakan acara tersebut, yang bertujuan untuk menjaga keharmonisan. Meskipun ada pandangan bahwa syarat tersebut merupakan bagian dari tradisi yang harus dihormati, beberapa tokoh agama menyatakan bahwa tidak ada larangan dalam Islam terkait arah pernikahan, melainkan yang lebih penting adalah sahnya pernikahan itu sendiri. Mitos buruk terkait pernikahan ngalor-ngulon, seperti kesulitan rezeki dan perselisihan rumah tangga, masih diyakini sebagian masyarakat, meskipun perkembangan zaman dan modernisasi mulai merubah pandangan tersebut. Meskipun hukum adat ngalor-ngulon mulai terkikis oleh pergeseran nilai sosial, masyarakat tetap menghargai

nilai-nilai kearifan lokal sebagai warisan budaya. Konflik dalam pernikahan ngalor-ngulon sering terjadi karena perbedaan pandangan dalam keluarga mengenai pelanggaran norma adat. Namun, pendekatan komunikasi yang baik dan saling menghormati sangat penting untuk menyelesaikan perbedaan ini, agar tercipta kedamaian dalam masyarakat.

Dari hasil temuan penelitian di atas terdapat beberapa fokus penelitian sebagai berikut

1. **Larangan Masyarakat Dusun Sweden terhadap Pernikahan dan Mitos yang Berkembang Seputar Pernikahan *Ngalor-Ngulon* (ke Arah Utara dan Barat)**

   Sesudah peneliti melakukan observasi dan wawancara terhadap informan tokoh agama dan tokoh masyarakat, adanya pandangan bahwasannya budaya pernikahan *ngalor-ngulon* (ke arah utara dan barat) di Dusun Sweden Desa Kaligrenjeng Kecamatan Wonotirto Kabupaten Blitar terdapat larangan dalam adat ini. Tokoh masyarakat menyampaikan pandangannya mengenai pernikahan *ngalor-ngulon* (ke arah utara dan barat) yang dianggap tabu dalam adat Jawa. Meskipun demikian, beliau mengungkapkan bahwa hal tersebut bisa diakali dengan cara tertentu, seperti dengan tidak merayakan pernikahan oleh kedua pengantin, cukup satu pihak saja yang melaksanakannya. Ia menekankan bahwa yang terpenting adalah keyakinan dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Menurutnya, meskipun ada larangan adat, selama seseorang melaksanakan pernikahan dengan niat yang baik dan penuh keyakinan kepada Tuhan, maka tak perlu khawatir akan dampak negatif. Hal ini mencerminkan pandangan yang lebih fleksibel terhadap adat, di mana yang lebih penting adalah keyakinan dan usaha untuk menjalani hidup dengan tanggung jawab. Meskipun demikian, ada pula yang tetap menghormati adat dan tradisi yang sudah ada, sebagai bentuk penghormatan terhadap budaya dan nilai-nilai leluhur. Pada akhirnya, setiap individu diharapkan dapat menghadapi aturan adat dengan keyakinan bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah takdir Tuhan, dan selama kita berusaha dengan niat baik, insyaallah kehidupan akan berjalan dengan lancar.

   Selain itu juga tidak ada larangan dalam adat ini. Dalam perspektif hukum Islam, pernikahan yang tidak melibatkan hubungan darah yang dekat, seperti antara saudara kandung atau orangtua dengan anak, dianggap sah dan diperbolehkan, meskipun terkadang bertentangan dengan adat yang berlaku di masyarakat, seperti dalam tradisi Jawa terkait pernikahan *ngalor-ngulon* (ke arah utara dan barat). Dalam hal ini, hukum Islam lebih menekankan pada

keabsahan akad nikah dan kesucian niat kedua mempelai, tanpa mempermasalahkan arah lokasi rumah atau faktor keturunan. Meskipun begitu, adat Jawa masih menganggap pernikahan dengan arah tersebut sebagai sesuatu yang tabu, dengan kepercayaan bahwa hal itu bisa mendatangkan musibah atau konflik. Beberapa tokoh agama mengingatkan pentingnya untuk menghormati adat istiadat, meskipun Islam tidak melarang pernikahan *ngalor-ngulon* (ke arah utara dan barat), dan menekankan perlunya menjaga hubungan baik dalam keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, meskipun pernikahan tersebut sah menurut agama, mempertimbangkan kearifan lokal dan menjaga keharmonisan sosial tetap menjadi hal yang penting, selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar agama.

2. Perspektif Hukum Islam terdahap Budaya Praktif Adat di Dusun Sweden

a. Tidak Ada Larangan di Pernikahan ini

Pernikahan *ngalor-ngulon* (ke arah utara dan barat) dalam syariat Islam tidak dilarang, asalkan tidak ada hubungan nasab atau persusuan antara pasangan. Hal ini berarti pernikahan tetap sah jika tidak ada hubungan darah atau susu yang menghalangi. Namun, hubungan persusuan memiliki syarat dan ketentuan tersendiri. Usia anak yang menyusui, misalnya, umumnya diharuskan berusia dua tahun, sebagaimana yang tercantum dalam hadis. Beberapa ulama berpendapat bahwa susuan lebih dari dua tahun bisa berlaku, bahkan untuk orang dewasa, sementara ulama lain menetapkan bahwa susuan yang sah adalah yang memenuhi kebutuhan lapar anak. Persusuan yang terjadi melalui puting susu ibu juga masih memunculkan perbedaan pandangan, dengan sebagian ulama berpendapat bahwa susuan melalui alat tetap menyebabkan hubungan susuan. Selain itu, terdapat ketentuan mengenai kemurnian susu dan asal susu yang berasal dari perempuan bersuami, serta kesaksian yang diperlukan untuk memastikan adanya hubungan susuan. Hubungan susuan dapat menyebabkan larangan pernikahan, seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi, yang mengharamkan pernikahan antara saudara sesusuan atau dengan ibu susuan, serta pihak-pihak yang memiliki hubungan nasab atau *mushaharah* akibat susuan.

b. Adat Kebiasaan Bisa Dijadikan Rujukan Hukum

Adat pernikahan *ngalor-ngulon* (ke arah utara dan barat), yang mengarah ke utara dan barat, telah menjadi tradisi yang diterima

masyarakat, dan seringkali dianggap sebagai hukum yang berlaku dalam melangsungkan pernikahan. Namun, dalam pandangan Islam, setiap individu harus diperlakukan secara adil dan setara di hadapan Allah, tanpa diskriminasi berdasarkan status sosial atau usia. Jika adat *ngalor-ngulon* (ke arah utara dan barat) mengandung penghormatan terhadap orang yang lebih tua atau lebih tinggi kedudukannya tanpa merugikan hak orang lain, adat tersebut dapat dianggap sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan prinsip keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap hak individu. Meski begitu, adat ini tidak bisa dijadikan hukum yang mengikat secara legal di negara modern seperti Indonesia yang menganut sistem hukum positif, di mana hukum negara, yang bersumber dari Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan, lebih diutamakan. Meskipun demikian, nilai-nilai yang terkandung dalam adat ngalor-ngulon, seperti rasa hormat dan kebersamaan, tetap relevan dalam kehidupan sosial masyarakat asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan Islam. Oleh karena itu, adat ini dapat diterapkan dengan bijaksana dalam membangun hubungan harmonis antar individu, tanpa melanggar prinsip agama, dan tidak bisa dijadikan sumber hukum yang mengikat di bawah hukum negara. Islam menghargai keberagaman adat selama tidak bertentangan dengan syariat, sehingga pelaksanaan adat pernikahan *ngalor-ngulon* (ke arah utara dan barat) , selama tidak melanggar aturan agama, dapat dianggap sah dan diperbolehkan.

D. Simpulan

Sesudah pembahasan pada bab-bab sebelumnya, peneliti bisa memberi beberapa poin dalam skripsi menjadi berikut:

1. Perspektif hukum Islam terhadap budaya praktik adat di Dusun Sweden, khususnya terkait pernikahan *ngalor-ngulon* (ke arah utara dan barat) merupakan bahwasannya tidak ada larangan tegas dalam hukum Islam terhadap praktik ini, selama tidak berterkaitan dengan prinsip-prinsip dasar syariat. Asalkan pernikahan tersebut memenuhi syarat sah berdasarkan Islam, adat tersebut bisa diterima. Islam menghargai keberagaman budaya selama tetap berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap hak individu. Adat *ngalor-ngulon* (ke arah utara dan barat) bisa menjadi pedoman sosial yang positif jika diterapkan dengan bijaksana tanpa melanggar ajaran agama.

2. Pandangan terkait pernikahan *ngalor-ngulon* (ke arah utara dan barat) di Dusun Sweden berbeda terkait tokoh agama dan tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat, lebih fleksibel dan memperbolehkan pernikahan tersebut asal tidak dirayakan besar-besaran dan menekankan keyakinan kepada Tuhan. Sementara itu, tokoh agama seperti menganggap pernikahan itu sah selama tidak melanggar hukum agama, meskipun ada kekhawatiran terkait dampak sosial dalam adat Jawa. Semua sepakat bahwasannya niat baik dan kesesuaian dengan ajaran agama yang penting, sambil menghormati adat. Perhatian terhadap adat-istiadat meskipun tidak berpengaruh terhadap sah atau tidaknya pernikahan dalam Islam merupakan bagian dari bentuk kebijaksanaan yang sebaiknya dipertimbangka.

Daftar Rujukan

Anam, K. (2019). Studi Makna Perkawinan Dalam Persepektif Hukum Di Indonesia (Komparasi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per) Dengan Komplikasi Hukum Islam. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*, 59–68.

Eko Setiawan. (2024). Fenomena Adat Larangan Pernikahan Dengan Posisi Rumah Ngalor-Nguolon Di Desa Kalipahit Kabupaten Banyuwangi. *JISPENDIORA Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan Dan Humaniora*, *3*(1), 221–231. https://doi.org/10.56910/jispendiora.v3i1.1233

Enik puji lestari, I Wayan Landrawan, & I Putu Windu Mertha. (2022). Fenomena Pantangan Perkawinan Ngalor Ngulon Bagi Masyarakat Desa Tambakrejo Dalam Perspektif Tokoh Adat Dan Masyarakat. *Jurnal Budaya Nusantara*, *5*(2), 68–74. https://doi.org/10.36456/jbn.vol5.no2.4617

Haerul Azmi, Moh. Asyiq Amrulloh, & Abdullah. (2022). Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Sembeq Senggeteng Di Desa Wanasaba Daya Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur. *Al-IHKAM: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah IAIN Mataram*, *14*(2), 143–160. https://doi.org/10.20414/alihkam.v14i2.6926

This article looks at the rule of law from an Islamic perspective . It accountable and transparent legal regimes , ensure equal opportunity. (2022). *30*(2), 201–226.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Syamsuddin, M. M. (2007). *Teologi Pembebasan Menurut Asghar Ali Engineer. Jurnal Filsafat*. Vol.1. No.2. https://doi.org/10.22146/jf.31350

Wulandari, F. (2021). *Jumlah Kasus KDRT Akibat Poligami 4 Kali Lebih Banyak Dibanding Monogami, (Online)* (https://m.tribunnews.com/lifestyle/2021/04/14/jumlah-kasus-kdrt-akibat-poligami-4-kali-lebih-banyak-dibanding-monogami), Diakses 07 Januari 2025

Yuniarti, R. (2023). *Dampak Poligami terhadap Perempuan dan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Negara. Makalah disajikan dalam Seminar Nasional Perlindungan Hak-Hak Perempuan, Universitas Indonesia*, Jakarta, 12 September.

Zaman, A. R. B. (2020). *Sejarah dan Dinamika Tafsir Al-Qur'an di Indonesia: Membaca Ayat-Ayat Poligami dalam Tafsir Al-Azhar dan Al-Misbah*. MUMTAZ.